DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: PARANGTRITIS Kecamatan: KRETEK Kabupaten: KAB. BANTUL

Provinsi: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bulan: 6 Tahun: 2025

Nama Pengisi: NANANG ANDARWANTO Pekerjaan: PERANGKAT DESA Jabatan: STAF KALURAHAN

Kepala Desa / Lurah: TOPO

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : DDK PROFIL DESA

Referensi 2: REGISTER DESA DAN PEDUKUHAN

Referensi 3: AGREGAT DATA KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL BANTUL

Referensi 4: KAJIAN LAPANGAN

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk						
Jumlah	Jenis Kelamin					
	Laki-laki	Perempuan				
Jumlah penduduk tahun ini	3959 orang	4096 orang				
Jumlah penduduk tahun lalu	3939 orang	4082 orang				
Persentase perkembangan	0.51 %	0.34 %				

B. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	2303 KK	573 KK	2876 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	2282 KK	572 KK	2854 KK
Prosentase Perkembangan	0.92 %	0.17 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran		
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	5315 orang	
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	794 orang	
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	341 orang	
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	4798 orang	
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	577 orang	

6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	

B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	233 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	801 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	1380 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	348 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	114 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	2876 keluarga

19 orang 7 orang

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Cabe	155	15	174375000000	465000000	775000000	1085000000	4185000000
Bawang Merah	155	18	753300000000	1302000000	3875000000	232500000	6065700000
Padi sawah	155	4.4	12003200000	310000000	232500000	310000000	728500000

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi	Biaya pemupukan	Biaya bibit	Biaya obat	Biaya lainnya
lanaman	(Ha)	(Ton/Ha)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tebu	1.5	35	26250000	3000000	2000000	3000000	7000000

Jenis Produksi	Hasil Produ	ıksi				Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)		lilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)		Jumlah Ternak (Ekor)
Telur	30	00 960		0		0			0	175
). SUBSEKTOR PERIKANA	N									
Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai	araduksi (Da)	Nilai Bah	an Baku yg	Nilai Bahan F yg diguna	enolong			Jenis usaha
Jenis Floduksi	(Ton/Tahun)	INIIAI Į	oroduksi (Rp)	diguna	kan (Rp)	yg diguna (Rp)		yanı	g dihabiskan (Rp)	perikanan
E. SEKTOR PERTAMBANGA	AN DAN GALIAN									
otal nilai produksi tahun ini									Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di									Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong ya									Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihab									Rp. 0,00	
Jumlah total jenis bahan tamb	oang dan galian yang	ada							0 jenis	
F. SUBSEKTOR KERAJINAN Total nilai produksi tahun ini	I								Rp. 750.000.0	200 00
Total nilai bahan baku yang di	igunakan								Rp. 250.000.0	
Total nilai bahan penolong ya	<u> </u>								Rp. 100.000.0	
Total biaya antara yang dihab									Rp. 0,00	
Total jenis kerajinan rumah ta	ngga								15 jenis	
G. SEKTOR INDUSTRI PENG										
G.1. Subsektor Industri Pan	gan								D 05 000 00	20.000.00
Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang di	igunakan								Rp. 35.000.00	
Total nilai bahan penolong ya	<u> </u>								Rp. 1.000.00	
Total biaya antara yang dihab									Rp. 0,00	
Total jumlah jenis industri tsb	yang ada								50 jenis	
H. SUBSEKTOR KEHUTANA	AN									
Total nilai produksi tahun ini									Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di	0								Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong ya Total biaya antara yang dihab	 								Rp. 0,00 Rp. 0,00	
Total biaya amara yang umab	iskaii								Kp. 0,00	
I. SEKTOR PERDAGANGAN I.1. Subsektor Perdagangan	'	TORAN								
Total nilai transaksi									Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan y	/ang ada								Rp. 0,00	
Total jumlah jenis perdaganga									Rp. 9,00	
Total nilai biaya yang dikeluar Total biaya antara lainnya	kan								Rp. 0,00 Rp. 0,00	
Total blaya antara lammya									145. 0,00	
I.2. Subsektor Perdagangan Jumlah total jenis perdaganga									21 jenis	
Total nilai transaksi									Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluar	kan								Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan e	eceran								Rp. 0,00	
I.3. Subsektor Hotel									100:	
Jumlah total penginapan dan Jumlah total pendapatan	penyediaan akomod	ası yan	g ada						130 jenis Rp. 0,00	
Jumian totai pendapatan Jumlah total biaya pemelihara	aan								Rp. 0,00	
Jumlah biaya antara yang dik									Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang									Rp. 0,00	
.4. Subsektor Restoran										
Jumlah tempat penyediaan ko									156 Unit	
Biaya konsumsi yang dikeluar	rkan								Rp. 0,00	
Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang	u dinavalah								Rp. 0,00 Rp. 0,00	
Illimian total bendanatan yang										

10.14	
J. Sektor Bangunan/Konstruksi	0070
Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	2876 unit
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00 Rp. 0,00
Diaya antara ianinya	κρ. 0,00
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	
K.1. Subsektor Bank	
Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	1 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	0 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan	Rp. 100.000.000,00
Diaya yang dikeluarkan	κρ. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	1 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 210.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 20.000.000,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
KA O LA MARIA DE LA PARA DE LA PA	
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
Jumlah perusahaan jasa	1 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya	Rp. 0,00
ріауа іанінуа	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	23 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
Diaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	кр. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
	1 - 272 2
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	10 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 10.000.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	0 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan	1 Jenis
sungai/danau/penyeberangan	
Jumlah total kendaraan angkutan	16 Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
•	
N.1. Subsektor Listrik	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	1 Jenis
	Rp 142,00
Jumlah nilai produksi listrik	IND 142,00
	Rp 284.000.000,00
Jumlah nilai produksi listrik	

N.2. Subsektor Gas				
Jumlah kegiatan penyediaan gas		8 jenis		
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00			
Nilai transaksi		Rp 0,00		
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00			
Diaya anala yang anolaanan		ητρ 0,00		
NO O LOUIS AL MILLO				
N.3. Subsektor Air Minum				
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum		0 jenis		
Nilai aset penyediaan air minum		Rp 0,00		
Nilai produksi air minum		Rp 0,00		
Nilai transaksi air minum		Rp 0,00		
Biaya antara yang dikeluarkan		Rp 0,00		
IV. PENDAPATAN PERKAPITA A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha				
A.1. Pertanian				
1. Jumlah rumah tangga	2501 k	Keluarga		
Jumlah total anggota rumah tangga	8057			
3. Jumlah rumah tangga buruh tani		eluarga		
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	1456			
5. Jumlah anggota ruman tangga burun 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		000.000,00		
э. энтпан репцаратан регкарна цан sektor tersebut untuk sehap ruman tangga	кр 3.0	000.000,00		
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA				
Jumlah Kepala Keluarga	2876 K	(K		
Jumlah Anggota Keluarga	8055 o			
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga		129.500.000,00		
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja		45.000.000,00		
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR	1 1 2 2			
1. Sektor Pertanian				
Petani	1 orang			
Buruh Tani	1732 orang	dorang displayed a second displa		
Pemilik Usaha Tani	523 orang			
2. Sektor Perkebunan				
Karyawan Perusahaan Perkebunan	0 orang			
·	0 orang	•		
·	0 orang	<u> </u>		
3. Sektor Peternakan				
Peternakan Perorangan	23 orang			
Buruh Usaha Peternakan	56 orang			
Pemilik Usaha Peternakan	511 orang			
4. Sektor Perikanan				
Nelayan	75 orang			
Buruh Usaha Perikanan	45 orang			
	156 orang			
5. Sektor Kehutanan				
	0 orang			
	0 orang			
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang			
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C				
Penambang Galian C Perorangan 0 orang				
	0 orang			
Pemilik Usaha Pertambangan	0 orang			
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga				
8. Sektor Industri Menengah dan Besar				
	8 orang			
	14 orang			
9. Sektor Perdagangan				
	25 orang			
ranyawan i Guayanyan nasii bullii	LU UIAIIY			

Buruh Perdagangan Hasil Bumi	132 orang		
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	engusaha Perdagangan Hasil Bumi 147 orang		
10. Sektor Jasa			
Kontraktor	2 orang		
Pegawai Negeri Sipil	200 orang		
Dokter swasta	5 orang		
Dukun/paranormal/supranatural	7 orang		
Jasa pengobatan alternatif	2 orang		
Notaris	1 orang		
Notaris	1 Grang		
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT			
A. ASET TANAH			
Tidak memiliki tanah		24 orang	
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha		3789 orang	
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		456 orang	
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha		125 orang	
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha		58 orang	
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha		15 orang	
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		20 orang	
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha		14 orang	
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha		16 orang	
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha		13 orang	
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha		10 orang	
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha		2 orang	
Memiliki tanah lebih dari 10 ha		0 orang	
Jumlah total penduduk		0 orang	
·		Ĭ	
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM			
		2 orang 2 upit	
Memiliki becak		2 orang- 2 unit	
Memiliki cidemo/andong/dokar		21 orang- 37 unit	
Memiliki kapal motor		4 orang- 9 unit	
Memiliki bus		1 orang- 5 unit	
C. ASET SARANA PRODUKSI			
Memiliki penggilingan padi		0 orang	
Memiliki traktor		9 orang	
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	0 orang		
Memiliki kapal penangkap ikan	30 orang		
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan		1 orang	
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan		7 orang	
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan		0 orang	
Memiliki alat pengolahan hasil hutan		0 orang	
Memiliki alat pengolahan nasil nutan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan			
		0 orang	
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata		112 orang	
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan		9 orang	
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah		19 orang	
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas		187 orang	
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING			
Tembok		2325 rumah	
Bambu		78 rumah	
DIIMALI MENIIDIIT I ANTAI			
RUMAH MENURUT LANTAI			
Keramik		2189 rumah	
Tanah	23 rumah		
1411411			
RUMAH MENURUT ATAP		1794 rumah	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng		1794 rumah 82 rumah	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng Asbes		1794 rumah 82 rumah	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng Asbes VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA		82 rumah	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng Asbes VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya		82 rumah 2278 Keluarga	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng Asbes VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya		82 rumah 2278 Keluarga 2437 Keluarga	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng Asbes VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya		82 rumah 2278 Keluarga 2437 Keluarga 794 Keluarga	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng Asbes VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya Jumlah keluarga memiliki ternak besar		82 rumah 2278 Keluarga 2437 Keluarga 794 Keluarga 4 Keluarga	
RUMAH MENURUT ATAP Genteng Asbes VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya		82 rumah 2278 Keluarga 2437 Keluarga 794 Keluarga	

A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	0 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	0 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	29 orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat	621 orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	1139 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	1351 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat	0 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	2548 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	170 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	609 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	38 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	0 orang
·	
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	618 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	1366 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang
, ,	
C. Rasio Guru dan Murid	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	0 orang
Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	216 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	0 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	621 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	0 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	374 orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat	0 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	352 orang
9. Jumlah siswa SLB	0 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang
·	
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	1 unit
	0 unit
Jumlah perpustakaan keliling	0 unit 5 unit
Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	
	0 kegiatan 0 kelompok
Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A	
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 orang 0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok
	·
Jumlah peserta ujian Paket C	0 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan	0 unit
puman pesena kuisus kelerampilan	6 orang
IX. KESEHATAN MASYARAKAT	

A. Kualitas Ibu Hamil	
Jumlah ibu hamil	88 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	88 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	88 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	66 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	11 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	11 orang

Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	83 orang
Jumlah ibu nifas	83 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	83 orang
B. Kualitas Bayi	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	27 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	27 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan	
mental	0 orang
C. Kualitas Persalinan	
Tempat Persalinan	lo "
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	1 unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
Tempat persalinan Polindes	1 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	1 unit
Tempat praktek dokter	1 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong botter	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	0 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	0 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	0 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	0 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	0 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	0 orang
Jumlah bayi 9 bulan	0 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	0 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang
ournair bayr yarig sadari irranisasi sacai	orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	Ta
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	352 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	2.056 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	0 pasangan
Keluarga Berencana	
Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang
	•
Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang
F. Wabah Penyakit	
Demam berdarah	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	3 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	j. ,

G. Angka Harapan Hidup			
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	74,35 Tahun		
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	74,35 Tahun		
Angka Harapan Hidup Provinsi	75,53 Tahun		
Angka harapan Hidup Nasional	72,26 Tahun		
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih			
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	25 Keluarga		
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	413 Keluarga		
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga		
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	2.017 Keluarga		
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga		
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga		
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	1 Keluarga		
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga		
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	45 Keluarga		
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga		
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber d	: 1		
atas	0 Keluarga		
Total jumlah keluarga	2.501 Keluarga		
, ,			
I. Perilaku hidup bersih dan sehat			
Kebiasaan buang air besar			
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	2.801 Keluarga		
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	7 Keluarga		
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga		
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	7 Keluarga		
Julilan keluarga yang menggunakan lasilitas MCK untum	/ Relualga		
Pola makan			
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali			
'			
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Tidak		
<u>'</u>	Tidak		
'	Tidak		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Tidak Sedikit		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit			
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih	Sedikit		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Sedikit Banyak		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Sedikit Banyak Banyak		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal	Sedikit Banyak Banyak Sedikit		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang 0 orang	erita	Di rawat di
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Unrang	erita	Di rawat di
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	erita	Rumah
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	erita	Rumah Rumah sakit
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal HIV/AIDS 0 orar	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	Prita	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal HIV/AIDS 0 orar	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	Prita	Rumah Rumah sakit
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal 1 orar Gila/stress 1 orar	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	Prita	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal 12 orar HIV/AIDS 0 orar Gila/stress 1 orar	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng		Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal 12 orar HIV/AIDS 0 orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit	Rumah Rumah sakit Rumah
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Ginjal HIV/AIDS O orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit	Rumah Rumah sakit Rumah
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Ginjal HIV/AIDS O orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Kader Posyandu aktif	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang	Rumah Rumah sakit Rumah
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Ginjal A orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Rok Umum Jumlah Rosyandu Jumlah kader Posyandu Jumlah pembina Posyandu	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Ginjal Porar Ginjal Qorar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Rosyandu Jumlah Rosyandu Jumlah Rosyandu Jumlah Penbina Posyandu Jumlah Dasawisma	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang 11 Dasawisma	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Ginjal HIV/AIDS O orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Rosyandu Jumlah Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang 11 Dasawisma 55 orang	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal 10 orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang 11 Dasawisma 55 orang 11 orang	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal 12 orar HIV/AIDS 0 orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang 11 Dasawisma 55 orang 11 orang 1 orang	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Ginjal HIV/AIDS O orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang 11 Dasawisma 55 orang 11 orang 1 orang	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke 9 orar Ginjal HIV/AIDS 0 orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah penbina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah pengurus Bapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang 11 Dasawisma 55 orang 11 orang 1 orang Diisi Diisi	Rumah Rumah sakit Rumah
Rebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Ginjal HIV/AIDS O orar Gila/stress 1 orar L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu	Sedikit Banyak Banyak Sedikit Sedikit Tidak ada 435 orang 0 orang 435 orang 0 orang 0 orang Jumlah pendeng	468 unit 12 unit 77 orang 1 orang 11 Dasawisma 55 orang 11 orang 1 orang	Rumah Rumah sakit Rumah

Jumlah kegiatan Posyandu 3 jenis	
umlah kader kesehatan lainnya 0 orang	
umlah kegiatan pengobatan gratis 1 jenis	
umlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN 0 jenis	
umlah kegiatan pembersihan lingkungan 0 jenis	
ainnya 7 jenis	
K. KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
A. Konflik SARA	
Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
lumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus
lumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus
lumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus
lumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/keluraha	
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
lumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
lumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
lumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
B. Perkelahian	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang kerbahnya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
	U Nasus
	0 kasus
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 kasus
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 kasus 0 orang
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	0 orang
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 orang 0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat	0 orang 0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya	0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendusetempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat	0 orang 0 kasus duk 0 kasus
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang 0 kasus duk 0 kasus 0 kasus
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	0 orang 0 kasus duk 0 kasus 0 kasus 0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 orang 0 kasus duk 0 kasus 0 kasus 0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Denduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang 0 kasus duk 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang 0 kasus duk 0 kasus 0 kasus 0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendusetempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Dumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Denis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Dumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Dumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang E. Pemakaian Miras dan Narkoba	0 kasus duk 0 kasus 0 kasus 0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendusetempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Dumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Denis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Dumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Dumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang E. Pemakaian Miras dan Narkoba Dumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu Bumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Dumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Denis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Dumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Dumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Dumlah warung/toko yang menyediakan Miras Dumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendusetempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Dumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Dumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Dumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Dumlah warung/toko yang menyediakan Miras Dumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Dumlah kasus mabuk akibat Miras	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu Bumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Dumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Dumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Dumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Dumlah warung/toko yang menyediakan Miras Dumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Dumlah kasus mabuk akibat Miras Dumlah pengedar Narkoba	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 to orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya benduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendusetempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah penduduk yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penguduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 toang 0 toang 0 toang 0 toang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan pendu setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 tasus 0 orang 0 orang 0 kasus 0 orang 0 kasus

G. Prostitusi	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
Junian peneruban penyediaan tempat prosutusi	U Kali
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
I. Penculikan	
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	12 orang
Jumlah orang cacat fisik	42 orang
Jumlah orang kelainan kulit	1 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 unit
Jumlah panti jompo	0 unit
Jumlah panti asuhan anak	0 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	70 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	0 orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	0 orang
Jumlah janda	0 orang
Jumlah duda	0 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat	0 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	0 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
·	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
	0 orang 0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	_
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang

L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga		
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri		0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami		0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak		0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua		0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya		0 kasus
M. Teror dan Intimidasi		
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan		0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan		0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan pen	duduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini		0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat		0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum f	ormal	0 kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta		
Organisasi Siskamling		Ada
Organisasi Siskaming Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat		Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda		55 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas		97 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda		Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas		2 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta		0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah		2 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan		1 Pos
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT		
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara	Ta .	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	1 jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	1 kegiatan	
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	1 jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	1 kegiatan	
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	1 jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	1 kegiatan 0 kasus	
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri		
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	10 orang	
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara	0 orang	
dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus	
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus	
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus	
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus	
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus	
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus	
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus	
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus	
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus	
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD		
	0 kasus	
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus	
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di		
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	0 kasus 0 kasus	
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 jenis	
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang	E 00
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74	5,00
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 %	5,00
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 % 0 tindakan	5,00
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 % 0 tindakan 1 jenis	5,00
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 % 0 tindakan 1 jenis 0 orang	
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 % 0 tindakan 1 jenis 0 orang Rp 4.000.000.0	
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 % 0 tindakan 1 jenis 0 orang Rp 4.000.000.0	
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 % 0 tindakan 1 jenis 0 orang Rp 4.000.000.0	000,00
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus 0 kasus 0 jenis 5668 orang Rp 526.035.74 100,00 % 0 tindakan 1 jenis 0 orang Rp 4.000.000.0 90,00 % 1 jenis	000,00

Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus
C. Partisipasi Politik	
I. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
lumlah penduduk yang memiliki hak pilih	7677 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	7677 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	12 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	5 partai 0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	36 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	4 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	6127 pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	6127 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	6127 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu	6127 pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyarakat secara langsung
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh
т енепшан т етапукат реза теппазик керата ризип	Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
Masa jabatan Kepala Desa	8 tahun
Japana I Topana 2000	o tarrerr
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Waliki secara langsung
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	7 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih masyarakat secara langsung
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secar langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
	1. Peraturan Desa 0 buah
	Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali
	Rancangan Peraturan Desa. 0 buah
	4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 k
Produk keputusan BPD tahun ini	Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
	6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
	7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaar
	APB Desa 0 kali
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Keputusan Kepala Desa
Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang	<u> </u>
Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	8 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Keputusan Lurah
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	5 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa Lurah
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi	10 kegiatan
	Aktif
anggota LKD/LKK	
anggota LKD/LKK Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	0 kegiatan Ada

Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW,	Ada	
kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada	
Dukungan nembiayaan, nersonil dan ATK untuk Sekretarjat LKD/LKK dari APR-Desa dan Anggaran	Kurang mema	adai
Keluranan/APBD		auai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi,	5,00 %	
Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi,	Ada dan teris	i
	Berfungsi	
C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN		
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan		
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasi dusun dan lingkungan		30 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan		60,00 % 45,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan		45,00 % 15,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan		2.00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangur	nan desa dan	Va
Forum Musrenbang Partisipatif		la la
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa Kelurahan		Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pa	rtisipatif	
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	DADD	15,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dala Desa		14,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sa: Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarak: desa/kelurahan	atan	5,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel		0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)		Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas un	tuk dihiavai	Ada
dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan		Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam A APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	APB-Desa,	0 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesu hasil Musrenbang	ai dengan	0 . kegiatan
 Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Mus 	renhana	250,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pe desa/kelurahan atau kabupaten/kota	! 4 - I-	220,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ketetapan dalam APB-Desa	ada sesuai	15 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APE		8 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Mi		0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan		0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sa	at	,
Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangun		0,00 %
sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesa		Ada
pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindakianjuti kegiatan yang belum diselesa pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga	INATI OICH	Ada
kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah		0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	(IIM	0 kasus 0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hul Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelura		0 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan		0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota		0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi		0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN		0 kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk		<u>'</u>
Jumlah kelompok arisan		37 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh		6 orang
Ada tidaknya dana sehat		Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah		Ada Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kul		Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas		
sosial/prasarana dan sarana		Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Ada
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan	7.44
lingkungan lainnya	Ada
iiigkurigan iaimiya	
4. Adat Istiadat	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
-	
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
·	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Aktif
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Pernah Ada
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Pernah Ada
<u> </u>	
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
	+ -
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
	1-
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan	e jee
	0 kasus
sejenisnya.	
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam	0 114646
	0
proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	0
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	0
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok	0
kepentingan lain	
Etos Kerja Penduduk	<u> </u>
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	0
	-
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
	-
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	1
	+
	0
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada	
saat kelaparan dan kekeringan	
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan	0
saat kelaparan dan kekeringan	0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	1
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	1 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	1 0 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	1 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	1 0 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi	1 0 0 2
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	1 0 0 2 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan	1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1 0 0 0 2 2 0 0 0 Tidak Jenis
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan	1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1 0 0 0 2 2 0 0 0 Tidak Jenis

Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis
ournan regiatan	o defins
2. PKK	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	10 Jenis
	1.0 0010
3. RUKUN TETANGGA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	15 Jenis
ournair regionali	To define
4. KARANG TARUNA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
ournan regiatan	o ocinis
5. KELOMPOK TANI/NELAYAN	Ada
Kepengurusan Buku Administrasi	Aktif/tidak Jenis
	-
Jumlah kegiatan	12 Jenis
6. BADAN USAHA MILIK DESA	Ada Aktif/tidak
Kepengurusan	
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	1 Jenis
7. LEMBAGA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
KIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	
A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 7.894.222.608,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 2.110.225.308,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 710.000.000,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 512.150.000,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 1.463.227.000,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 1.831.365.300,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 1.252.655.000,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 14.600.000,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 5.561.576.692,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 2.332.645.916,00
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah	
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan	2 jenis
kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	·
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
aporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	1 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	1 kasus

Ruang

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Gedung Kantor Jumlah ruang kerja

Poloi Dogo/Kolurahan/agianjanya	
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	l .
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Vesin fax	unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	unit
Refluctional Diffus Curan/Repair Desa	unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	
Buku Administrasi Kependudukan	
Buku Data Inventaris	
Buku Data Aparat	
Buku Data Tanah Kas Desa	
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	
•	
Buku Data Tanah	
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	
Buku Agenda Ekspedisi	
Buku Profil Desa dan Kelurahan	
Buku Data Induk Penduduk	
Buku Data Mutasi Penduduk	
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	
Buku Data Penduduk Sementara	
Buku Anggaran Penerimaan	
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	
Buku Kas Umum	
Buku Kas Pembantu Penerimaan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	
Buku Kas Pembantu Penerimaan Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor	Puang
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja	Ruang
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD	Ruang -
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD	Ruang -
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik	Ruang -
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih	Ruang -
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja	Ruang -
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih	Ruang -
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon	Ruang -
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor	-
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik	buah
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja	buah buah
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi	buah buah buah buah
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip	buah buah buah buah buah
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip	buah buah buah buah
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer	buah buah buah buah buah
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Felepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Felepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Gelepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan P. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Felepon P.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax P.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD	buah buah buah buah buah unit
Suku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Suku Data Lembaga Kemasyarakatan Suku Data Lembaga Kemasyarakatan Suku Data Lembaga Kemasyarakatan Suku Data Lembaga Kemasyarakatan Suku Balai BPD Sukuri Berja Sukuri Bersih Sukuri Bersih Sukuri Bersih Sukuri Bersih Sukuri Bersih Sukuri Balai BPD Sukuri Bukuri Administrasi BPD Sukuri Bukuri Administrasi Keanggotaan Sukuri Bukuri BPD Sukuri Bukuri Balai BPD Sukuri Balai BPD Sukuri Balai BPD Sukuri Bukuri Balai BPD Sukuri Balai	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan Buku Barana Banan	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan Buku Barana Banan	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan E. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Jistrik Kiri bersih Telepon E.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Jumlah almari arsip Komputer Jesin fax E.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Lainnya Buku Lainnya	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Felepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan E. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Jistrik Jir bersih Felepon E.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax E.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku-buku administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku Lainnya B. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor	buah buah buah buah buah unit
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Jistrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Buku Admina peraturan desa Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris	buah buah buah unit unit Jenis
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi Keanggotaan Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Buku administrasi	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Felepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku-buku administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Barang inventaris Buku administrasi Buku administrasi	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis Jenis
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Jistrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi Keanggotaan Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku Administrasi Jenis Kegiatan Jumlah pengurus	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis Jenis Orang
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Jestrik Air bersih Felepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis Jenis
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Jestrik Air bersih Felepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis Jenis Orang
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Bedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Balai BPD Betrik Berik B	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis Jenis Orang
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan P. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Bedung Kantor Iumlah ruang kerja Balai BPD Jistrik Kiri bersih Felepon P. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Iumlah mesin tik Iumlah meja Iumlah meja Iumlah almari arsip Komputer Mesin fax P. B. Administrasi BPD Buku Buku Administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Lainnya B. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Bedung kantor Berang inventaris Buku administrasi Buku Administrasi Buku Administrasi Beris kegiatan Buku tulis kantor Barang inventaris Buku Administrasi	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis Jenis Orang
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan Buku Data Lembaga Kemasyarakatan 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai BPD Listrik Air bersih Telepon 2. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku Lainnya 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Barang inventaris Buku administrasi Buku administrasi Buku administrasi	buah buah buah buah unit unit Jenis Jenis Jenis Orang

Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan	Ada
kelurahan	Ada
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	Ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing masing	Ada
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	0 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	0 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	7 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	1
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	1
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	0 kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	1 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	0 jenis
pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	'
	,
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	3 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	3 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada	3 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepada desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Penberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penderdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan de	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Peadoman pendataan dan sendayagunaan profil desa dan kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan Perdoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Perdoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan dasa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas penyelingan ayan dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pemay	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Regiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Regiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Regiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Regiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Regiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Peraberian pengharan dan BPD Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dikapa pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kel	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepada desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelathian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan penangsilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan Pemberian sanksi atas penyengan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan	3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelalihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Regiatan peningkatan pendoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pempelengaraan pemerintahan dan pemberagayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi at	3 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kesala dasa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedaman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Peroman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pendibaraan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah	3 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Resilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Peroman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberadayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala d	3 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis

Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2 kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	2 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	2 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	1 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	0 kali

KAB. BANTUL, 30 Juni 2025 PARANGTRITIS Kecamatan KRETEK Kabupaten KAB. BANTUL

<u>TOPO</u> Kepala Desa

- Tembusan : 1. Camat KRETEK 2. Bupati KAB. BANTUL 3. Arsip